

KEBIJAKAN PRIVATISASI PENDIDIKAN SEBAGAI DAMPAK DARI GLOBALISASI

Aris Maulana¹, Fibria Indriati²

Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia^{1,2}

E-mail: aris.maulana02@ui.ac.id

ABSTRAK

Makalah ini membahas fenomena privatisasi pendidikan di tengah era globalisasi. Dengan studi literatur yang sistematis, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji suatu perdebatan kebijakan yang kontroversial dan/atau untuk mendukung praktik di lapangan. Penelitian ini melihat bahwa pendidikan yang dapat dikategorikan sebagai barang publik (public goods) kini mulai bergeser sifatnya menjadi barang privat (privat goods) yang dimungkinkan oleh globalisasi. Pemerintah dan lembaga pendidikan dituntut untuk dapat beradaptasi pada era ini dengan cepat. Privatisasi pendidikan juga membantu mengatasi berbagai tantangan dalam dunia pendidikan di era globalisasi. Kemudian, penelitian ini juga menjelaskan hal-hal terkait privatisasi pendidikan berdasarkan jenis-jenis kegiatannya menurut para ahli. Privatisasi pendidikan juga dibahas dari berbagai sudut pandang yang menjelaskan alasan mengapa privatisasi perlu dilakukan. Hal tersebut memunculkan pendapat bahwa privatisasi sengaja dirancang dan didesain, bukan karena kebetulan dan serampangan, dan bahwa implementasinya telah dilakukan dengan sengaja, serius dan penuh semangat di seluruh dunia untuk mencapai tujuan globalisasi modal (kapitalisme).

Kata Kunci: *Globalisasi, Kebijakan Publik, Privatisasi Pendidikan, Sekolah*

ABSTRACT

This paper discusses the phenomenon of educational privatization in the era of globalization. With a systematic study of the literature, this research is conducted to examine a controversial policy debate and/or to support practice in the field. This study sees that education which can be categorized as a public good is now starting to shift its character into a private good made possible by globalization. Governments and educational institutions are required to be able to adapt in this era quickly. Privatization of education also helps overcome various challenges in the world of education in the era of globalization. Then, this research also explains matters related to the privatization of education based on the types of activities according to the experts. Privatization of education is also discussed from various points of view explaining the reasons why privatization is necessary. This gives rise to the opinion that privatization is deliberately designed and designed, not by chance and haphazard, and that its implementation has been carried out deliberately, seriously and enthusiastically around the world to achieve the goal of capitalism globalization.

Keywords: *Globalization, Public Policy, Privatization of Education, Schools*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi di bidang informasi membuat banyak perubahan yang signifikan bagi masyarakat di seluruh dunia. Hal ini membuat penduduk dunia masuk dalam era yang disebut dengan globalisasi. Globalisasi mengubah struktur ekonomi dunia yang didominasi oleh perusahaan multinasional dengan kekuatan finansial, politik, organisasi yang sangat berpengaruh di tingkat nasional, pemerintahan demokratis, dan administrasi publik di seluruh dunia (Farazmand, 1994; 1999a; Mander dan Goldsmith, 1996, Farazmand, 2002). Globalisasi menyebabkan karakter dan peran negara menjadi berubah, baik secara militer maupun ekonomi, untuk memfasilitasi proses globalisasi modal (Graycar, 1983; Lipsky, 1984; Cerny, 1995; Strange, 1996; Farazmand, 1997).

Begitu juga dalam dunia pendidikan, globalisasi memiliki pengaruh besar pada pendidikan di seluruh dunia. Salah satu manifestasi dari hal itu adalah apa yang disebut sebagai *Global Education Reform Movement (GERM)* (Pasi Sahlberg, 2011; Sears 2006). Sahlberg berpendapat, mempekerjakan model manajemen dari dunia bisnis, seperti akuntabilitas berbasis tes, gaji berbasis prestasi dan administrasi berbasis data (2011: 99; Sears 2006) untuk membawa pendidikan lebih sesuai dengan kebutuhan kepentingan bisnis global,

dan telah menyebar seperti virus ke negara-negara di seluruh dunia.

Kapitalisme global membutuhkan negara untuk merestrukturisasi dan kemudian memungkinkan operasi menguntungkan dan ekspansi lintas batas. Inilah yang disebut oleh Jessop (2002) disebut sebagai '*competition state*'. Negara bertindak sebagai '*commodifying agent*' yang memberikan pendidikan ke dalam bentuk komoditas, kontrak, dan '*recalibrating institutions*' dalam upaya menjadikannya sesuai dengan proses '*market form*' sehingga menciptakan tambahan kebutuhan ekonomi dalam sektor publik di mana bisnis dapat beroperasi. Landasan ideologis inilah yang mendorong para *optimists* dan *idealists* untuk membeli konsep korporasi dari pasar sebagai kekuatan utama untuk menjalankan masyarakat dan mengatur lembaga-lembaga yang ada (Fazmand, 2002), termasuk pendidikan.

Berangkat dari latar belakang tersebut, peneliti akan berupaya memberikan gambaran mengenai privatisasi pendidikan sebagai dampak dari globalisasi dari berbagai perspektif teori yang ada.

KAJIAN PUSTAKA

Barang Publik (*Public Goods*)

Barang publik, seperti yang didefinisikan oleh teori ekonomi adalah barang yang setelah diproduksi dapat

dikonsumsi oleh konsumen tambahan tanpa biaya tambahan (Holcombe, R. G., 1997). Para ekonom juga mendefinisikan barang publik sebagai barang yang memiliki salah satu atau kedua karakteristik *Nonexcludability* dan *jointness*. *Nonexcludability* berarti sulit untuk mencegah orang mengkonsumsi barang setelah diproduksi, dan *jointness* dalam konsumsi berarti setelah diproduksi untuk satu orang, konsumen tambahan dapat mengkonsumsi tanpa biaya tambahan. Barang-barang konsumsi bersama disebut juga barang konsumsi kolektif atau barang konsumsi nonrival. Barang dengan karakteristik tersebut akan kurang diproduksi di sektor swasta, atau mungkin tidak diproduksi sama sekali, mengikuti kebijakan konvensional, sehingga efisiensi ekonomi mengharuskan pemerintah memaksa orang untuk berkontribusi pada produksi barang publik, dan kemudian mengizinkan semua warga negara untuk mengkonsumsi barang publik tersebut. Holcombe (1997) mengamati dua masalah dalam penerapan teori barang publik sebagai pembenaran untuk produksi pemerintah. Pertama, banyak barang publik yang berhasil diproduksi di sektor swasta, sehingga produksi pemerintah tidak diperlukan. Kedua, banyak barang yang sebenarnya diproduksi oleh pemerintah tidak sesuai dengan definisi ekonom tentang barang publik, sehingga teori tersebut tidak menjelaskan peran aktual pemerintah dalam perekonomian. Holcombe (1997)

juga menjelaskan bahwa tidak ada alasan untuk percaya bahwa barang publik dapat diproduksi lebih efisien di sektor publik daripada di sektor swasta. Secara teoritis, ada banyak alasan mengapa produksi barang publik oleh sektor swasta memiliki keunggulan efisiensi dibandingkan produksi sektor publik, termasuk kemampuan untuk mengungkapkan preferensi konsumen terhadap barang tersebut, penghapusan kelebihan beban perpajakan, dan adanya motif keuntungan bagi produsen sektor swasta. Secara empiris, Holcombe mengamati banyak barang publik yang berhasil diproduksi di sektor swasta, mulai dari siaran televisi dan radio perangkat lunak mikrokomputer.

Globalisasi

Velho (1997) telah berbicara tentang globalisasi sebagai objek, perspektif, dan cakrawala. Pendekatan objek melibatkan pemikiran globalisasi sebagai proses tunggal, seolah-olah 'itu' sedang ditangani dari sudut pandang Archimedean. Ini tidak sepenuhnya mungkin, tetapi meskipun demikian dengan reflektifitas yang memadai, seseorang dapat terus membidik fokus pada objek tertentu 'secara objektif', yang berarti bahwa ada tingkat intersubjektivitas yang luas. Sejauh posisi perspektif yang bersangkutan, Velho sendiri berpendapat bahwa, dari dalam 'komunitas' para ahli dan pengamat proses global, dunia mengambil corak yang berbeda jika dilihat dalam istilah global. Ini, memang merupakan salah satu tujuan utama dari bidang pendidikan global yang berkembang.

Akhirnya, dalam paradigma Velho, globalisasi dapat dipahami sebagai arah di mana dunia dianggap secara keseluruhan bergerak. Sinopsis singkat dari diskusi Velho ini menunjukkan kisaran pengandaian yang harus disadari oleh setiap kontributor perdebatan. Harus ditambahkan bahwa ada juga praanggapan yang berbeda yang dihasilkan dari sudut pandang disiplin (Robertson dan Khondker 1998). Memang, studi tentang globalisasi ditandai oleh percampuran besar orientasi disiplin, dan perdebatan yang dihasilkan telah dan masih dilakukan di situs mutasi disiplin utama, sehingga mungkin disebut perkembangan transdisipliner.

Globalisasi telah dibahas dalam sosiologi dan antropologi, serta dalam studi agama, sejak akhir 1970-an dan awal 1980an. Namun, seperti yang semakin nyata dalam beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap globalisasi sebenarnya sudah dimulai sejak berabad-abad yang lalu. Kita harus mengakui dengan jelas bahwa gagasan globalisasi tidak sepenuhnya memasuki wacana akademis, apalagi politik dan intelektual yang lebih luas, hingga akhir 1980-an atau awal 1990-an. Faktanya, menurut Robertson, R., & White, K. E. (2007) penggunaan istilah ini secara luas di seluruh dunia dimulai hanya setelah runtuhnya Tembok Berlin pada tahun 1989 dan runtuhnya komunisme. Perpecahan, karena memang begitu adanya, antara mereka yang mengambil posisi ekonomi utama pada globalisasi, mengacu pada akhir kapitalisme, dan

mereka yang telah mengadopsi pandangan yang lebih luas, adalah karakteristik kuat dari konsep tersebut.

Kebutuhan untuk mengenali keduanya, awalnya sangat terpisah tetapi sekarang menyatu, penggunaan istilah globalisasi dapat dikenali secara sederhana dalam contoh berikut. Selama akhir 1990-an muncul apa yang secara populer disebut gerakan antiglobalisasi, yang terutama terletak tetapi tentu saja tidak secara eksklusif di masyarakat Barat. Seiring berkembangnya gerakan ini, melalui demonstrasi yang seringkali besar-besaran, terkadang disertai kekerasan, pada pertemuan organisasi seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Dana Moneter Internasional (IMF) dan majelis G7/8, sebagian besar melalui penggunaan Internet yang semakin instrumental dalam memfasilitasi gerakan global semacam itu, demikian pula perkembangan kesadaran global tentang apa yang dianggap sebagai ketidaksetaraan besar yang dihasilkan oleh globalisasi, terutama dalam pengertian ekonomi. Ketika protes terhadap globalisasi kapitalistik berkembang pesat, demikian pula perasaan bahwa gerakan itu sendiri adalah bagian dari proses globalisasi. Oleh karena itu, perbedaan yang muncul pada awal 2000-an antara pengertian globalisasi dari atas (*the 'enemy'*) dan globalisasi dari bawah (*the 'good guy'*). Sementara itu, sejak awal 1990-an memang telah dikembangkan sebuah kebijakan, yang dipromosikan terutama oleh negara-negara yang lebih makmur, yang mendukung keinginan

pasar terbuka, perdagangan bebas, deregulasi dan privatisasi. Mendampingi advokasi kebijakan semacam itu (yang biasanya diberi label neoliberalisme) telah tumbuh signifikan dalam kehidupan ekonomi dunia sebagai keseluruhan perusahaan transnasional (TNCs). Memang, yang terakhir inilah yang sering menjadi perwakilan paling ikonik dari apa yang dianggap banyak orang sebagai sisi 'jahat' globalisasi.

Dalam konsentrasi pada konsepsi kapitalistik globalisasi sejumlah faktor ilmiah sosial yang penting sangat diabaikan. Jenis pendekatan yang dikembangkan pada akhir 1970-an dan awal 1980-an terhadap fenomena tersebut telah dan masih jauh lebih multidimensi (Robertson, R., & White, K. E., 2007). Sejak awal, mereka yang mengadopsi pendekatan yang lebih multidimensi, sebagai lawan dari pendekatan unidimensional (ekonomi), untuk diskusi dan studi tentang globalisasi menggunakan seperangkat sumber daya intelektual yang lebih luas dan di hadapannya tidak begitu jelas ideologinya bagi mereka yang mengadopsi postur ekonomi. Pandangan globalisasi yang lebih umum ini berakar pada seperangkat premis yang berbeda. Latar belakang munculnya teori globalisasi adalah pengamatan yang relatif sederhana bahwa dunia semakin menjadi 'tempat tunggal'. Penekanan pada dunia sebagai menjadi tunggal (seperti yang dicirikan oleh Robertson, 1992) memiliki

konsekuensi penting dalam pengembangan berbagai ilmu sosial. Dalam satu atau lain cara itu telah sangat mempengaruhi lintasan intelektual disiplin sosiologi, ilmu politik dan antropologi. Misalnya, gagasan tentang dunia sebagai satu tempat telah menimbulkan pertanyaan besar tentang kecenderungan sosiologis untuk memahami unit dasar dan terbesar sosiologi sebagai masyarakat (Mann 1986, 1993; Urry 2000; bandingkan Outhwaite 2006). Dalam ilmu politik dan hubungan internasional, pertumbuhan pesat minat globalisasi telah menyebabkan meningkatnya pertanyaan tentang tema sentral seperti kedaulatan dan wilayah. Dan dalam antropologi, perhatian agak cepat dialihkan dari studi masyarakat, khususnya yang disebut masyarakat primitif, seolah-olah mereka kurang lebih sepenuhnya terisolasi, ke arah pandangan yang lebih inklusif tentang berbagai jenis masyarakat yang berbeda dan khususnya dari transendensi batas-batas masyarakat oleh berbagai proses globalisasi, seperti migrasi dan hibridisasi.

Privatisasi

Beberapa dekade terakhir, privatisasi usaha pemerintah telah melanda dunia. Ribuan perusahaan negara dari Afrika, Asia, Amerika Latin, Eropa Barat dan Timur telah menjadi perusahaan swasta (Kikeri et al. 1992). Faktor penting di balik langkah menuju privatisasi ini adalah kinerja buruk perusahaan publik yang terdokumentasi dengan baik. Donahue

(1989) menyurvei beberapa studi yang menunjukkan biaya publik yang jauh lebih tinggi dibandingkan penyediaan layanan kotamadya swasta di Amerika Serikat. Lopez de Silanes (1993) mendokumentasikan rendahnya profitabilitas negara dibandingkan dengan perusahaan swasta di Meksiko pada 1980-an. Mueller (1989) dan Vining dan Boardman (1992) mensurvei lusinan studi tentang perusahaan publik dan swasta di seluruh dunia, yang sebagian besar menunjukkan bahwa perusahaan swasta lebih efisien. Studi lainnya menunjukkan bahwa efisiensi meningkat setelah privatisasi (Megginson et al., 1994).

Privatisasi merupakan kombinasi dari dua perubahan yang dilakukan oleh seorang reformis (Boycko & Vishny, R. W., 1996). Yang pertama adalah pergantian kendali dari politisi pembelanja ke manajer, yang sering disebut sebagai korporatisasi. Pergantian seperti itu dapat dilaksanakan oleh pemerintahan reformasi yang kuat yang secara efektif menekan kementerian dan birokrasi. Atau, pergantian semacam itu bisa terjadi lebih spontan, karena kekuatan birokrasi untuk melindungi hak kontrolnya berkurang. Perubahan kedua yang biasanya menjadi bagian dari sebagian besar privatisasi adalah pengurangan kepemilikan arus kas oleh Bagian Keuangan (pemerintah) dan peningkatan kepemilikan arus kas manajer dan pemegang saham luar. Pemerintah dapat menjual sahamnya

secara tunai, atau dapat memberikannya melalui voucher atau skema alokasi lainnya. Model dari Boycko & Vishny, R. W. (1996) menunjukkan bagaimana realokasi hak kontrol dan peningkatan hak arus kas swasta berkontribusi pada restrukturisasi.

Privatisasi juga digunakan sebagai instrumen strategis globalisasi (Farazmand, A., 2002). Privatisasi berfungsi dalam banyak cara untuk mempromosikan globalisasi modal. Menurut Farazmand (2002) fungsi tersebut meliputi:

1. Perluasan sektor bisnis-korporasi
Privatisasi dapat menghilangkan bidang pemerintahan dan mengubahnya menjadi ranah eksklusif bagi kapitalis korporat yang mengglobal. Privatisasi dapat membuat suatu perusahaan menjadi di luar kendali pemerintah dan menjadi komoditas untuk dipertukarkan di pasar global.
2. Penciptaan 'tentara industri'
Privatisasi berkontribusi pada penciptaan 'tentara industri' baru di seluruh dunia dengan memberhentikan pekerja, karyawan, menghilangkan tunjangan mereka, dan membuat mereka tersedia untuk instansi dan perusahaan yang diprivatisasi sebagai pekerja dan karyawan sementara dan murah.
3. Degradasi manusia
Privatisasi mengurangi pekerja dan karyawan menjadi penerima upah harian dan memotong upah

- dan tunjangan mereka di sektor publik maupun swasta.
4. Kasta terendah
Privatisasi lebih jauh mendorong mayoritas absolut populasi dunia ke dalam kasta terendah yang jauh lebih buruk daripada sistem perbudakan abad pertengahan dan perbudakan negara kuno serta modern atau buruh bayaran. Di masa lalu 'tuan' pemilik budak diwajibkan untuk menyediakan tempat tinggal/ perumahan dasar, makanan minimum pada tingkat subsisten dan perlindungan terhadap serangan eksternal untuk para petani, pelayan, dan budak. Dengan privatisasi yang meluas, baik negara kapitalis modern maupun perusahaan-perusahaan global telah mencuci tangan mereka dan sekarang menolak untuk menyediakan kebutuhan dasar ini kepada warga pekerja.
 5. Kontrol sosial
Dengan privatisasi yang meluas, peran negara direduksi menjadi peran menjaga hukum dan ketertiban yang represif dan penyediaan kontrol sosial atas segmen populasi yang berpotensi meledak dan dirugikan secara ekonomi, sosial dan politik.
 6. Ideologi budaya individualistis
Privatisasi “mempromosikan” budaya ideologis individualisme, konsumerisme, dan preferensi pasar yang mereduksi tubuh dan jiwa warga menjadi komoditas pasar untuk dijual dan direbut.
 7. 'Agensi' dan 'subsidiaritas'
Subsidiaritas juga bisa berarti keagenan dari struktur otoritas horizontal, sebagai perwakilan dari organisasi lain dalam bentuk kemitraan untuk mencari keuntungan dan menguasai domain pasar.
 8. Elit politik sebagai agen globalisasi
Privatisasi cenderung mempromosikan jaringan baru elit politik dan pemerintahan yang berasal dari elit bisnis dan didukung oleh mereka, dan mereka beroperasi sebagai agen modal perusahaan dengan mengesahkan undang-undang dan peraturan yang mendukung proses privatisasi dan globalisasi.
 9. Kehilangan aset publik
Dengan privatisasi, warga negara dan masyarakat berpotensi kehilangan aset nasional mereka yang paling berharga dan pemerintah dan negara menghadapi risiko manipulasi, penyalahgunaan, dan dikte oleh elit perusahaan global, sebuah fenomena yang kemungkinan akan membawa negara-negara ini ke potensi kebangkrutan dan perbudakan
 10. Tumbuhnya budaya memintaminta
Dengan meluasnya privatisasi dan hilangnya aset nasional, budaya mengemis dan ketergantungan berkembang untuk mendukung elit perusahaan global, karena

orang dan organisasi dipaksa untuk meminta dana dari perusahaan bisnis monopoli yang memberikan uang dengan kondisi yang mempromosikan budaya globalisasi modal dan tujuannya untuk akumulasi surplus yang cepat.

11. Menyusutkan 'ruang publik'

Dengan menyusutnya 'ruang publik', ruang pribadi perusahaan besar dan pemimpin bisnis meluas, yang pada gilirannya berkontribusi pada globalisasi kapital lebih lanjut.

METODE

Studi ini merupakan studi literatur yang menggunakan pendekatan sistematis karena dianggap sebagai pendekatan yang paling cocok untuk mengkaji perdebatan suatu kebijakan yang kontroversial dan/atau untuk mendukung praktik (Hagen-Zanker dan Mallet, 2013; Petticrew dan Roberts, 2006). Pendekatan ini dirancang untuk mengumpulkan, mensintesis, dan meringkas bukti yang diidentifikasi dengan fokus pada kebijakan privatisasi pendidikan di era globalisasi. Rangkaian pencarian ditulis berdasarkan kata kunci dan istilah pencarian untuk studi yang relevan. Sumber-sumber yang relevan diidentifikasi melalui tiga jalur terpisah, yaitu pencarian literatur akademik, yang dikumpulkan dari *database* jurnal elektronik; *snowballing*, yang melibatkan pencarian saran yang relevan dari pakar kunci baik dari pakar kebijakan maupun akademik melalui data sekunder di buku; dan menangkap

literatur abu-abu, yang melibatkan pencarian dari berbagai situs web/laman institusional terpilih yang menyediakan informasi yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan sebagai Barang Publik (*Public Goods*)

Barang publik seharusnya dapat digunakan oleh masyarakat tanpa biaya karena semua bersumber dan disediakan oleh negara. Namun, dalam praktiknya arti barang publik tersebut bergeser dari arti yang seharusnya, terutama terlihat pada negara-negara berkembang yang mengandalkan sumber pendapatan dari pajak. Barang publik sangat terkait dengan konsep eksternalitas, yang merujuk pada manfaat yang bersifat tambahan dan eksternal terhadap produk yang diproduksi dan dibeli di pasaran (Berg, 2011). Barang publik dapat diidentifikasi melalui karakteristiknya, tidak bersaing (*non-rival*) dan tidak eksklusif (*non-excludable*) (Varian, 1992). Jika merujuk pada Undang-undang dasar 1945, Pada Pasal 31 ayat 1 disebutkan "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat 2 disebutkan "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya", maka, pendidikan termasuk dalam kategori barang publik. Namun dalam praktiknya, di Indonesia, pendidikan sudah tidak lagi murni menjadi barang publik karena sebagian sudah diprivatisasi oleh pemerintah, sehingga masyarakat tidak lagi dapat

memperolehnya secara gratis. Dapat dilihat dari banyaknya sekolah swasta bukan hanya yang berasal dari lokal, namun internasional banyak didirikan di Indonesia, dan juga terjadi di berbagai negara. Dalam tulisan ini, peneliti membatasi bahasannya hanya pada pengaruh globalisasi terhadap kebijakan privatisasi pendidikan.

Globalisasi Pendidikan

Sebelum era globalisasi, sekolah menyiapkan peserta didik untuk berbagai peluang dan tantangan masa depan yang relatif dapat diprediksi. Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, sekolah menghadapi tantangan sosial baru yang diarahkan dalam pembangunan yang tidak terduga dan sifat pekerjaan yang berubah. Tantangan-tantangan ini menuntut perolehan pengetahuan baru, keterampilan, dan pola pikir baru oleh orang-orang yang bekerja di lembaga pendidikan saat ini, baik di tingkat sekolah maupun di lembaga pendidikan tinggi (Moloi, 2009). Pengembangan kurikulum telah menjadi proses yang berkelanjutan, yang harus ditinjau dan direvisi untuk memastikan bahwa penekanan pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan dalam kurikulum akan memungkinkan lulusan sekolah untuk berpartisipasi dalam konteks global yang terus berubah. Tenaga kerja komunitas global di masa depan akan membutuhkan serangkaian kompetensi yang berbeda yang akan meningkatkan kemampuan peserta didik untuk mengakses, mengadopsi dan menerapkan pengetahuan dan

keterampilan baru dalam lingkungan kerja yang berubah. Orang-orang muda yang ingin memasuki dunia kerja akan diminta untuk berpikir secara mandiri, untuk melakukan penilaian yang tepat dan untuk berkolaborasi dengan orang lain untuk memahami kebutuhan dan tuntutan global yang baru (Global Information Infrastructure Commission, 2005; Moloi, 2009). Lebih jauh lagi, akumulasi pengetahuan dan akumulasi keterampilan yang diperlukan dan relevan juga akan semakin terjadi di luar lembaga pendidikan formal dan pembelajaran di tempat kerja akan menjadi semakin penting untuk memberikan keunggulan yang kompetitif. Penerapan konsep dan prinsip-prinsip '*learning organizations*' — terkadang melalui kolaborasi secara global maupun secara lokal — akan menjadi hal biasa bagi lembaga pendidikan manapun yang benar-benar ingin memberikan keuntungan yang substansial dan berbeda bagi siswa (Subramaniam dan Venkatraman, 1999: 1; Moloi, 2009).

Dalam era Globalisasi, teknologi informasi dan komunikasi menyediakan infrastruktur untuk baru untuk model ekonomi dunia. Seperti disebutkan sebelumnya, teknologi informasi telah menghilangkan jarak dan waktu juga menghasilkan sumber kekayaan baru dalam bentuk pengetahuan yang diterapkan untuk menciptakan nilai. Untuk institusi pendidikan di semua tingkatan, kesuksesan saat ini didasarkan pada pengembangan dan penerapan ide-ide dan informasi baru

yang relevan untuk membuat dunia kerja lebih efisien (Petrash, 2002; Moloji, 2009). Pengetahuan yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga ini adalah kunci untuk berpartisipasi dalam ekonomi global, kewirausahaan, usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan dalam pelayanan publik.

Menurut Moloji (2009), untuk mengatasi tantangan dalam era globalisasi, dibutuhkan tindakan di berbagai tingkatan yaitu

1. Institusi pendidikan harus bekerja secara berbeda dengan membangun sistem, infrastruktur, dan mekanisme yang akan memungkinkan peserta didik menjadi lebih akrab dan nyaman dengan konsep-konsep dan situasi yang tidak pasti.
2. Kompleksitas globalisasi mengharuskan mata pelajaran / bidang pembelajaran yang diajarkan di lembaga-lembaga ini harus diseimbangkan sedemikian rupa sehingga secara akademis mampu mengakomodasi keterampilan kewirausahaan yang diperlukan agar peserta didik dapat berperan dalam ekonomi global.

Peserta didik harus didorong untuk bekerja dalam tim sejak usia dini, karena dalam lingkungan global yang kompetitif, kemitraan dan kolaborasi strategis sangat penting untuk keberhasilan. *Physical teams* dan *globally networked virtual teams* menjadi kunci untuk sukses.

Pelajar/pembelajar juga perlu mempelajari dan menguasai tentang literasi global (Bigelow dan Peterson, 2002) yaitu kemampuan untuk dapat mengenali dan menilai secara kritis dampak globalisasi pada manusia dan budaya di seluruh dunia. Selain itu, lembaga pendidikan perlu memenuhi fungsi-fungsi penting antara lain

1. untuk menyadari dan menerapkan strategi dalam mengatasi kekurangan yang dibawa anak-anak miskin ke lingkungan sekolah;
2. untuk memberikan perhatian khusus yang diperlukan kepada anak perempuan, anak jalanan, dan anak-anak yang terkena dampak HIV dan AIDS dalam rangka memastikan keberhasilan mereka;
3. untuk mengintegrasikan kegiatan sekolah dengan kegiatan ekonomi;
4. untuk terlibat dalam semacam program literasi yang harus dimiliki oleh orang dewasa; dan
5. untuk memasukkan semua hal di atas dalam kebijakan dan prosedur resmi mereka secara tertulis, dan diwujudkan dalam visi dan misi mereka dan dengan demikian, menunjukkan komitmen mereka terhadap keadilan sosial untuk terlibat dalam pemberantasan masalah yang terkait dengan ketidakadilan sosial seperti kemiskinan, eksploitasi, dan ketidaksetaraan.

Dinamika yang terjadi dalam era globalisasi membuat pemerintah di suatu negara harus lebih cepat dan dinamis menyesuaikan seperti yang telah dijelaskan tersebut. Dengan membangun komunitas belajar yang berisikan pendidik dengan motivasi tinggi (Senge 1996, 2; Gravett, 2009), diharapkan dapat membantu peran pemerintah dalam mengatasi tantangan tersebut. Di Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, kerja sama dengan komunitas pendidikan gencar dibangun. Semangat gotong-royong membangun pendidikan, merupakan misi yang dilakukan untuk mewujudkan visi menjadikan sumber daya manusia yang unggul. Kemudahan melalui manajemen pengetahuan yang efektif, sekolah akan dapat membangun kemampuan jangka panjang (Fahy et al., 2004; Gravett, 2009). Pengetahuan yang diperoleh melalui pembelajaran berkelanjutan akan diterapkan untuk menciptakan nilai di sekolah (Wheatley, 2002; Ohmae, 2005).

Privatisasi dalam Pendidikan

Privatisasi layanan pendidikan telah menjadi konsep yang mudah berubah secara politis, membangkitkan reaksi keras dari sayap kiri dan kanan (Bulkley, 2011). Perdebatan muncul ketika privatisasi dianggap menjadi strategi kunci dalam reformasi pendidikan dan reformasi negara, tetapi tidak selalu merupakan tujuan itu sendiri, melainkan bagian dari '*judicious mix*' dari strategi politik dan

perubahan keseimbangan hubungan di antara berbagai jenis institusi, aparatur, dan lembaga (Jessop 2002, 50). Di sisi yang lain, Inggris menunjukkan *institutional outsourcing market* di bidang pendidikannya hampir mati suri saat ini (Ball, 2009). Bisnis pendidikan di Inggris terlihat pesimis dengan kemauan politik dalam mengembangkan bidang ini. Artinya, tidak semua percobaan dalam privatisasi berhasil atau berkelanjutan. Meskipun demikian, penting untuk memperhatikan semakin beragamnya 'peluang bisnis', termasuk bentuk-bentuk baru *outsourcing*, yang dimana semakin meningkatnya pendidikan di suatu negara yang didivestasi dan 'diprivatisasi'. Kecenderungan dalam setiap bentuk privatisasi berbeda dan perlu dipertimbangkan secara terpisah dan bersama-sama. Ball menjelaskan setidaknya ada tiga bentuk keterlibatan swasta dalam sektor pendidikan yaitu

- (1) *Organisational recalibration, 'selling' improvement and mediating policy*
- (2) *The colonisation of the infrastructures of policy*
- (3) *The global reach of education business*

Organisational recalibration, 'selling' improvement and mediating policy

Bentuk privatisasi ini hanya mendapat sedikit perhatian, terlepas dari kenyataan bahwa bisnis pendidikan yang semakin meningkat merupakan bagian integral dari proses kebijakan pendidikan ketika kebijakan diberlakukan di dalam dunia sekolah,

kampus, dan universitas yang biasa, adalah menjual solusi kebijakan dan 'peningkatan' kepada sekolah. Jenis kegiatan ini termasuk penjualan pengembangan profesional berkelanjutan, konsultasi, pelatihan, dukungan, dan layanan program langsung ke sekolah (juga perguruan tinggi dan universitas) yaitu, penjualan kebijakan sebagai komoditas (Ball, 2007). Para peneliti harus memperhatikan dampak privatisasi pendidikan tersebut pada tata kelola sekolah lokal. Peneliti perlu mengungkap bagaimana privatisasi pendidikan dapat membuka pintu bagi vendor luar untuk menggunakan pengaruh politik atas desain dan administrasi dari reformasi akuntabilitas lokal. (Burch 2006)

The colonisation of the infrastructures of policy

Privatisasi ini disebut sebagai 'privatisasi kebijakan', dan apa yang dimaksud di sini adalah produksi serta konsultasi mengenai gagasan kebijakan oleh perusahaan bidang pendidikan di dalam suatu negara; ekspor 'statework' ke penyedia swasta dan 'lembaga'; dan pembentukan dan penyebaran wacana kebijakan baru yang timbul dari partisipasi perusahaan-perusahaan ini dalam penulisan laporan, evaluasi, saran, konsultasi dan rekomendasi (Mahony, Menter, dan Hextall 2004). Dengan kata lain, perwakilan dari sektor swasta beroperasi di dalam pemerintahan dan merupakan bagian dari 'komunitas pembuat kebijakan' (Mahony, Menter, dan Hextall 2004).

Ini terjadi di semua tingkatan dan bentuk kebijakan. Bisnis pendidikan dan konsultasi tertanam kuat dalam jaringan yang kompleks, irisan/pembagian antara pembuatan dan penyampaian kebijakan dan berbagai jenis transaksi (broker dan penulisan kontrak) - sebagian besar tersembunyi dari pandangan. 'Statework' dilakukan melalui berbagai hubungan dan tanggung jawab di dalam, dan dalam kaitannya dengan tata kelola pendidikan – bisnis yang bertindak sebagai penasihat, evaluator, pemberi layanan, dermawan, peneliti, pengulas, broker, 'mitra', anggota komite, dan sebagai konsultan dan auditor.

The global reach of education business

Semakin banyak bisnis pendidikan yang berusaha untuk melakukan diversifikasi dan internasionalisasi untuk terus mencari peluang pasar baru. Caves (1974) mengatakan bahwa perusahaan tidak menjadi perusahaan multinasional kecuali mereka pandai melakukan sesuatu. Pasar layanan pendidikan di Inggris merupakan contoh ajang pembuktian untuk pengembangan keahlian dan kredibilitas layanan pendidikan, yang awalnya bekerja sama dengan terikat kontrak pemerintah, yang kemudian dapat diekspor. Hal tersebut memungkinkan lembaga pendidikan untuk menerapkan sistem pendidikannya ke banyak negara. Contoh, reputasi dan keahlian lembaga pendidikan Nord Anglia dengan pendidikan Inggris memberikannya kesempatan untuk memanfaatkan

permintaan di pasar luar negeri untuk peningkatan kualitas dalam penyediaan pendidikan (Laporan Tahunan Perusahaan 2006, 8; ball 2006). Dari contoh tersebut terlihat privatisasi tidak hanya di tingkat daerah atau nasional, melainkan sampai ke mancanegara karena dampak globalisasi.

Dampak dari globalisasi mewajibkan pemerintah untuk melakukan banyak penyesuaian sitem pendidikan di berbagai negara. Menurut Andrew (2015), reformasi sektor publik adalah hal biasa di negara-negara berkembang. Kebijakan Privatisasi merupakan salah satu upaya atau langkah pemerintah untuk menjawab tantangan globalisasi. Di Indonesia privatisasi pendidikan di lakukan untuk membantu pemerintah mengatasi kekurangan lembaga pendidikan di suatu daerah. Namun demikian, dengan adanya pengaruh dari globalisasi, sekolah bertaraf internasional makin 'mewabah'. Contohnya adalah British International School dan Cambridge School yang melebarkan sayapnya sampai ke Indonesia. Tentunya privatisasi jenis ini hanya bisa dinikmati oleh segelintir masyarakat yang mampu membayar layanan dan fasilitas pendidikan yang jauh di atas rata-rata dari lembaga pendidikan yang didirikan oleh pemerintah di Indonesia.

Privatisasi di Indonesia cenderung membuat kesenjangan di sektor pendidikan di wilayah Indonesia (Digdowiseiso, 2020). Kita lihat contohnya di pendidikan tinggi. Menurut UU No. 20/2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional, sistem pendidikan tinggi di Indonesia terdiri dari: (1). Akademi; (2) Politeknik; (3) Sekolah lanjutan; (4) Institut; dan (5). Universitas. Akademi hanya menyediakan satu disiplin ilmu tertentu, baik sains, teknik, atau seni. Politeknik fokus pada pendidikan terapan atau pengetahuan khusus. Sementara itu, sekolah lanjutan, mirip dengan akademi, lebih menekankan pada satu pengetahuan khusus. Institut memberi perhatian khusus pada satu disiplin ilmu. Sementara universitas berkonsentrasi pada pelatihan dan pendidikan tinggi di berbagai disiplin ilmu. Tabel 1 menunjukkan bahwa institusi swasta mendominasi sebagian besar pendidikan tinggi di Indonesia. Namun, hanya 3,5 persen yang dikelola oleh pemerintah. Menurut Nizam dalam Digdowiseiso (2020), ada peningkatan yang signifikan dalam tingkat pendaftaran pendidikan tinggi di Indonesia dari sekitar 3 persen pada 2005 menjadi lebih dari 13 persen pada 2014. Ada dua faktor yang berkontribusi terhadap fenomena ini, yaitu: (1). Kondisi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah Indonesia; dan (2). Permintaan pasar kerja saat ini.

Tabel 1 Jenis Pendidikan di Indonesia

No	Bentuk	Negeri	Swasta
1	Akademi	-	715
2	Politeknik	25	89
3	Sekolah Lanjutan	-	1043
4	Institut	10	43
5	Universitas	46	345
Total		81	2235

Sumber: DGHE, 2018; Digdowniseiso 2020

Eksistensi privatisasi pendidikan tentunya juga didorong oleh keinginan pasar yang ingin mendapatkan pendidikan yang lebih dari standar. Pendidikan merupakan investasi bagi manusia dalam menghadapi masa depan (Widiyono, 2020). Investasi sumber daya manusia adalah sejumlah dana yang dikeluarkan dengan tujuan memiliki peluang untuk mendapatkan penghasilan selama proses investasi. Investasi dalam sumber daya manusia di bidang pendidikan memiliki tujuan menghasilkan pendapatan dan kebahagiaan setelah proses investasi selesai (Widiyono, 2020). Sudut pandang ini juga membuat sektor privat dalam bidang pendidikan tetap eksis. Namun tidak dipungkiri bahwa sekolah negeri juga masih menjadi favorit bagi sebagian besar masyarakat Indonesia karena biayanya yang jauh lebih murah.

KESIMPULAN

Globalisasi membuat sektor pendidikan yang merupakan barang publik mengarah ke barang privat. Dampak positif dan negatif dapat dilihat dalam penerapannya. Contoh dampak positif privatisasi pendidikan bagi kebijakan publik antara lain: pertama, dapat memberikan peluang ekonomi pada masyarakat selaku penyelenggara pendidikan swasta. Dengan menyerahkan masalah ini ke pihak swasta, negara dapat terhubung langsung kepada masyarakat dan

lembaga di luar pemerintahan dalam hal bisnis dan komunikasi kebijakan. Kedua, profesi administrator publik, secara umum, dan analisis kebijakan publik, khususnya, diwajibkan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan global yang terus berubah. Hal tersebut menuntut mereka untuk memiliki keterampilan baru yang memungkinkan mereka berfungsi lebih efisien dan lebih fleksibel dalam pengambilan keputusan, dalam proses manajerial dan dalam kinerja. Ketiga, terbentuknya pola pikir global dengan mengaitkan dengan permasalahan lokal atau sebaliknya. Membangun kesadaran global semacam itu penting dan membantu dalam mencerahkan pemikir bidang administrasi publik yang berpikiran sempit di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Ini adalah poin positif yang patut mendapat perhatian dalam pendidikan Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik. Tentunya dengan memanfaatkan teknologi informasi, kita dapat belajar dan berbagi praktik terbaik terbaru untuk melayani kepentingan publik yang lebih luas.

Kemudian ada juga efek negatif yang perlu menjadi perhatian seperti ancaman kedaulatan negara dengan munculnya kapitalisasi global; ancaman monopoli dan oligopolistik yang meluas; sektor privat terlihat lebih superior dari sektor publik; peluang konflik kepentingan, korupsi, akses ke informasi sensitif dan menguntungkan di pemerintahan, nepotisme, penyuapan, dan pelanggaran akuntabilitas akan meningkat secara

signifikan; dan lain sebagainya yang menarik untuk dijadikan bahasan dalam penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrews, M. (2015). *Explaining positive deviance in public sector reforms in development*. World Development, 74, 197-208. doi:10.1016/j.worlddev.2015.04.017
- Ball, S. J. (2009). *Privatising education, privatising education policy, privatising educational research: Network governance and the 'competition state'*. Journal of Education Policy, 24(1), 83-99. doi:10.1080/02680930802419474
- Bigelow, B. and Peterson, B. (eds) (2002) *Rethinking Globalization. Teaching for Justice in an Unjust World*. Wisconsin: Rethinking Schools.
- Boycko, M., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1996). *A theory of privatisation*. The Economic Journal, 106(435), 309-319.
- Bulkley, K. E., & Burch, P. (2011). *The changing nature of private engagement in public education: For-profit and nonprofit organizations and educational reform*. Peabody Journal of Education, 86(3), 236-251. doi: 10.1080/0161956X.2011.578963
- Digdowiseiso, K. (2020). *The development of higher education in indonesia*. International Journal of Scientific and Technology Research, 9(2), 1381-1385. Retrieved from www.scopus.com
- Donahue, John D. (1989). *The Privatization Process*. New York: Basic Books.
- Farazmand, A. (1999). *Globalization and public administration*. Public Administration Review, 59(6), 509-522. doi:10.2307/3110299
- Farazmand, A. (2002). *Privatization and globalization: A critical analysis with implications for public management education and training*. International Review of Administrative Sciences, 68(3), 355-371. doi: 10.1177/0020852302683004
- Hagen-Zanker, J. and Mallett, R. (2013). *How to do a rigorous, evidencefocused literature review in international development: A Guidance Note*. London: ODI
- Holcombe, R. G. (1997). *A theory of the theory of public goods*. The Review of Austrian Economics, 10(1), 1-22.
- Kikeri, Sunita, Nellis, John and Shirley, Mary (1992). *Privatization: The Lessons of Experience*. Washington, DC: The World Bank.
- Lopez de Silanes, Florencio (1994). *Determinants of privatization prices*. Harvard (mimeo).
- Mann, M. (1986). *The Sources of Social Power*, vol. 1. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mann, M. (1993). *The Sources of Social Power*, vol. 2. Cambridge: Cambridge University Press.

- Megginson, William L, Nash, Robert C. and van Randenborgh, Mathias (1994). *The financial and operating performance of newly privatized firms*. Journal of Finance, vol. 49, pp. 403-5.
- Moloi, K. C., Gravett, S. J., & Petersen, N. F. (2009). *Globalization and its impact on education with specific reference to education in South Africa*. Educational Management Administration & Leadership, 37(2), 278-297.
- Mueller, Dennis C. (1989). *Public Choice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ohmae, K. (2005). *The Next Global Stage: Challenges and Opportunities in Borderless World*. Bergen County, NJ: Wharton School Publishing.
- Outhwaite, W. (2006). *The Future of Society*. Oxford: Blackwell.
- Robertson, R. (1992). *Globalization: Social Theory and Global Culture*. London: Sage.
- Robertson, R. and Khondker, H.H. (1998). *Discourses of globalization: Preliminary considerations*, International Sociology, 13 (1), 25–40.
- Robertson, R., & White, K. E. (2007). *What is globalization*. The Blackwell companion to globalization, 54-66.
- Sears, A. (2016). *Learning from each other: The positive face of globalization in education*. Citizenship Teaching and Learning, 11(2), 117-120. doi:10.1386/ctl.11.2.117_2.
- Urry, J. (2000). *Sociology beyond Societies*. London: Routledge.
- Van den Berg, R. D. (2011). *Evaluation in the context of global public goods*. Evaluation, 17(4), 405-415. doi: 10.1177/1356389011420210
- Varian, H. R. (1992). *Microeconomic analysis (3rd ed.)*. New York: W.W Norton & Company, Inc.
- Velho, O. (1997). *Globalization: Object, perspective, horizon*. In L.E. Soares (ed.), Cultural Pluralism, Identity, and Globalization, 98–125. Rio de Janeiro: UNESCO and Candido Mendes University.
- Vining, Aiden and Boardman, Anthony (1992). *Ownership vs. competition: efficiency in public enterprise*. Public Choice, vol. 73, pp. 205-39.
- Widiyono, D., Mujiyanto, Kardoyo, Suro, & Kuswati, E. (2020). *Analysis of the implementation of the education cost in private buddhist higher education in indonesia*. International Journal of Scientific and Technology Research, 9(1), 142-148. Retrieved from www.scopus.com